

PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI HUTAN Pengalaman dari Kampung Binaan: Bikar di Tambrau, Papua Barat Daya serta Wasur di Merauke, Papua Selatan

ARTIKEL LAINNYA

PERTEMUAN FORUM SATU DATA UNTUK BERBAGI DATA DAN KOLABORASI
Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

LOKAKARYA PENYEMPURNAAN PERATURAN MENTERI
tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Editorial

Dari Tambrau hingga Merauke, di Tanah Papua, tenaga-tenaga pendamping Kelompok Tani Hutan (KTH) menulis kisah inspiratif tentang pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam. Di Kampung Bikar, KTH berinisiatif memproduksi minyak lawang, memadukan kesadaran akan populasi pohon kayu lawang yang semakin menipis dengan kebutuhan subsisten mereka. Sementara itu, di Kampung Wasur, Koperasi Bualas memelopori budidaya anggrek berkelanjutan, memamerkan 22 spesies endemik, dan menapaki proses perizinan usaha kehutanan berbasis masyarakat yang penuh tantangan.

Edisi Newsletter September ini mengisahkan catatan pendampingan oleh fasilitator kampung di Kampung Bikar dan Wasur. FORCLIME, mendukung secara teknis unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UPT KLHK) dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Provinsi Papua) dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian (Provinsi Papua Barat Daya), yang dengan cermat memilih dan melatih fasilitator kampung untuk mendampingi KTH di kedua kampung tersebut. Melalui lokakarya yang komprehensif, fasilitator kampung memperoleh pemahaman tentang GIZ, Program Kehutanan dan Perubahan Iklim (FORCLIME), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), prinsip-prinsip Perhutanan Sosial, perencanaan partisipatif, manajemen pengetahuan (*knowledge management*), dan prosedur pelaporan.



Selain keterampilan teknis, fasilitator dilengkapi dengan keterampilan komunikasi untuk membantu mereka membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan anggota masyarakat. Sehingga dapat mendorong dialog terbuka, yang memungkinkan anggota KTH dengan nyaman berbagi keprihatinan dan aspirasi mereka.

Pelatihan tersebut membekali mereka dengan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk unggul dalam peran mereka, menjembatani pengetahuan tradisional dengan praktik-praktik inovatif, dan membantu KTH mengatasi tantangan seperti akses pasar dan kerumitan perizinan.

Fasilitator kampung adalah tulang punggung pemberdayaan masyarakat, yang mendorong pembangunan berkelanjutan dari kampung (pedesaan). Dedikasi dan keahlian mereka menjadikan mereka agen perubahan sejati. Dengan berinvestasi dalam pertumbuhan dan pendidikan berkelanjutan mereka, kami memberdayakan mereka untuk membimbing masyarakat menuju kemandirian dan keberlanjutan. Untuk itu, pengalaman pendampingan KTH di Bikar dan Wasur merupakan contoh bagaimana pemberdayaan masyarakat adat, yang didukung oleh fasilitator kampung yang terlatih, dapat mengarah pada pembangunan berkelanjutan, melestarikan warisan budaya, sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi, dan pastinya dengan segenap tantangan!

Mohammad Sidiq

Manajer bidang strategis pengelolaan hutan Lestari dan
Koordinator Tanah Papua

Pendampingan Kelompok Tani Hutan:

Pengalaman dari Kampung Binaan: Bikar di Tambrauw, Papua Barat Daya serta Wasur di Merauke, Papua Selatan

*Otniel Effruan, Koordinator Provinsi Papua Barat Daya, FORCLIME
Wanto, Fasilitator Kampung Wasur, Merauke Papua Selatan*

PENGALAMAN DARI KAMPUNG BIKAR

Dilema Kekayaan Hayati dan Kelestarian Pohon Kayu Lawang di Kampung Bikar

Keanekaragaman hayati yang tinggi di Kampung Bikar, Tambrauw Papua Barat Daya, meskipun menjadi potensi luar biasa, justru memunculkan dilema tersendiri. Pohon kayu lawang, dengan segala manfaatnya, ternyata jumlahnya terbatas di tengah kekayaan hayati tersebut. Kelimpahan pohon kayu lawang ini kini menghadapi ancaman serius. Eksploitasi pohon kayu lawang yang berlebihan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kelestarian alam membuat populasi pohon kayu lawang semakin terancam. Faktanya, mendorong usaha minyak kayu lawang menjadi tantangan tersendiri.

Di satu sisi, pemberdayaan masyarakat melalui hasil hutan bukan kayu (HHBK) minyak lawang sangat penting. Namun, di sisi lain, keterbatasan jumlah pohon kayu lawang mengharuskan adanya pengaturan yang bijak. Tanpa pengaturan yang tepat, eksploitasi berlebihan dapat mengancam kelestarian pohon ini. Di sinilah peran pemberdayaan kelompok tani menjadi sangat krusial. Pengetahuan tradisional masyarakat tentang cara pemanenan yang berkelanjutan perlu diangkat dan diintegrasikan dengan pengetahuan inovatif.

Upaya pendampingan dan advokasi dari berbagai pihak, seperti fasilitator kampung (Faskam) dan para pendamping lapangan, sangat dibutuhkan agar pemberdayaan kelompok tani menuju keberlanjutan dapat terwujud. Dengan demikian, potensi ekonomi dari minyak kayu lawang dapat terus dirasakan oleh masyarakat setempat tanpa mengorbankan kelestarian alam. Beberapa alasan mengapa pemberdayaan kelompok tani menuju keberlanjutan sangat penting:

Pengetahuan lokal dan praktik kultivasi: Masyarakat memiliki pengetahuan turun-temurun tentang cara menjaga kelestarian kayu lawang, seperti “Sasi” dan teknik menanam kembali. Pengetahuan ini perlu didokumentasikan, dikembangkan, dan diintegrasikan dengan praktik budidaya inovatif.

Pengaturan pemanenan dan produksi: Kelompok tani perlu diberdayakan untuk secara kolektif mengatur waktu panen, jumlah panen, dan lokasi pemanenan agar memberikan waktu bagi pohon untuk beregenerasi.

Peningkatan nilai tambah: Pemberdayaan kelompok tani dapat diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk minyak kayu lawang, misalnya dengan mengembangkan produk turunan atau mengemas produk secara lebih menarik.

2



Pelatihan fasilitator untuk kampung binaan.

Dari Tradisi ke Inovasi: Menuju Minyak Lawang Berkelanjutan

Upaya mendorong kemajuan ekonomi di Kampung Bikar tidak melupakan akar budaya dan kearifan lokal yang telah mengakar kuat. Salah satu fokus utama adalah menjembatani tradisi dan inovasi dalam pengolahan minyak lawang, komoditas berharga yang lekat dengan identitas masyarakat.

Program pendampingan difokuskan untuk menyelaraskan metode tradisional dengan praktik berkelanjutan. Pelatihan dan studi banding ke Kampung Honitetu di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang telah berhasil menerapkan teknik serupa, menjadi pintu gerbang transformasi. Masyarakat diperkenalkan dengan teknik-teknik ramah lingkungan yang tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi minyak lawang, tetapi juga menjaga kelestarian pohon kayu lawang itu sendiri.

Pengalaman di Honitetu, diharapkan mampu memicu semangat dan ide baru bagi masyarakat Kampung Bikar. Transformasi minyak lawang ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus melestarikan warisan alam untuk generasi mendatang.

Pengalaman Mendampingi KTH: Menyatukan Potensi Masyarakat

Kutipan tentang “menyusun puzzle” dengan tepat menggambarkan tantangan dalam memberdayakan KTH di Kampung Bikar. Bukan tentang memaksakan perubahan instan, melainkan menyelaraskan beragam kepentingan demi masa depan yang berkelanjutan. Pemberdayaan KTH bukanlah proses mengubah mereka, melainkan menyatukan potensi mereka seperti kepingan *puzzle* demi mewujudkan Kampung Bikar yang sejahtera dan lestari.

Membayangkan KTH sebagai kepingan *puzzle* unik menggambarkan dengan tepat kompleksitas pemberdayaan masyarakat. Setiap KTH memiliki karakteristik yang beragam, seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak, kearifan lokal yang perlu dihargai, dan kesiapan berubah yang membutuhkan pendekatan sensitif. Meskipun beragam, mereka disatukan oleh tujuan bersama: mewujudkan Kampung Bikar yang lestari. Tujuan ini mencakup melestarikan kayu lawang untuk generasi mendatang, mewujudkan kemandirian masyarakat dalam mengelola

sumber daya alam, dan membangun kemitraan yang setara dimana dukungan dari luar melengkapi, bukan menggantikan, solusi lokal. Di sinilah peran fasilitator menjadi krusial. Sebagai penghubung, bukan pengatur, fasilitator berperan mendalami motivasi dan kearifan lokal setiap KTH, menjembatani kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta memfasilitasi masyarakat dalam menemukan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan.

Analisis Permasalahan Pasar dan Urgensi Peran Pemerintah Daerah

Situasi petani minyak kayu lawang yang menerima harga jual rendah, sementara kolektor menikmati margin tinggi, merupakan cerminan ketimpangan posisi tawar dalam rantai nilai. Faktor biaya transportasi yang tinggi semakin melemahkan posisi petani. Kondisi ini menuntut peran pemerintah sebagai *off-taker* untuk menciptakan keseimbangan dan meningkatkan taraf hidup petani.

Permasalahan utama:



Rantai Pasokan Panjang: Sistem perdagangan konvensional melibatkan perantara (kolektor) sehingga margin keuntungan terdistribusi tidak merata. Petani, sebagai produsen utama, menerima bagian terkecil.



Informasi Pasar Terbatas: Akses terbatas terhadap informasi harga pasar dan permintaan menyebabkan petani mudah terjebak dalam sistem harga yang ditentukan oleh kolektor.



Kualitas Produk Belum Optimal: Kurangnya pengetahuan dan teknologi pengolahan pascapanen menyebabkan kualitas minyak kayu lawang belum konsisten, menurunkan nilai jual.



Akses Terbatas terhadap Permodalan: Keterbatasan modal membuat petani sulit mengembangkan usaha dan meningkatkan skala produksi.



AREA
DIPERBESAR

P. PAPUA



Raja Ampat

KOTA
SORONG

Bikar
Emaus

Tambrau

PAPUA BARAT DAYA

Sorong

Wendi
Haha

Maybrat

Sorong
Selatan



Pembuatan minyak lawang di Kampung Bikar

Contoh Rantai Nilai dengan Posisi Tawar Petani yang Lebih Kuat:



- **Model BUM Desa/Kampung (koperasi yang mengelola galeri):** Pusat produk atau Galeri HHBK memungkinkan petani mengkonsolidasikan produksi, meningkatkan daya tawar dalam negosiasi harga yang lebih adil, dan mengakses pasar yang lebih luas.
- **Kemitraan strategis dengan pihak industri (swasta):** Kerja sama langsung dengan industri pengolahan minyak kayu lawang dapat memotong rantai pasokan dan menjamin harga beli yang lebih baik bagi petani.
- **Pengembangan Platform Digital:** Platform digital dapat menghubungkan petani langsung dengan konsumen atau pembeli besar, memangkas peran perantara dan meningkatkan transparansi harga.

Peran Pemerintah sebagai Off-taker:



- **Menyerap Produksi Petani:** Pemerintah daerah – melalui pusat produk atau Galeri HHBK–dapat bertindak sebagai pembeli utama minyak kayu lawang dengan harga yang wajar, menjamin pasar yang stabil bagi petani.
- **Memfasilitasi Akses Pasar:** Pemerintah dapat memfasilitasi promosi, pameran, dan pengembangan pasar ekspor untuk meningkatkan akses petani terhadap pasar yang lebih luas.
- **Memberdayakan Petani melalui Pelatihan:** Program pelatihan dan pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam budidaya, pengolahan pascapanen, dan manajemen usaha.
- **Memperkuat Kelembagaan Petani:** Dukungan terhadap kelompok tani sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan negosiasi petani.

Produk minyak lawang dari Kampung Bikar



PENGALAMAN DARI KAMPUNG WASUR *Kampung Wasur Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan*

Mari kita menuju Wasur, sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pada awal tahun 1947, para misionaris mencatat keberadaan sebuah suku kecil bernama Mangat-rik atau Mora-ori, yang menganggap tempat ini sebagai rumah mereka. Bayangkan hanya 55 individu yang hidup di sebuah kampung bernama Mbur, dekat Sungai Maro, tak jauh dari lokasi Merauke saat ini. Seiring berjalannya waktu, mereka membangun pusat baru bernama Bud, dan kini kita mengenalnya sebagai Suku Marori Men-Gey, yang bermukim di sebuah kampung yang masih disebut Wasur (terkadang Wosul).

Wasur bukan sekadar kampung; ia adalah gerbang menuju petualangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Wasur pada tahun 1997, sebuah keajaiban alam yang luasnya mencapai lebih dari 400.000 hektare. Bayangkan savana yang unik, flora dan fauna langka yang tidak ditemukan di tempat lain, dan sumber air penting bagi masyarakat Merauke. Ini adalah bukti kekayaan tradisi budaya Suku Marind yang mendiami wilayah selatan Papua. Ingatlah, ada Kampung Wasur, rumah bagi Suku Marori Men-Gey, dan ada Taman Nasional Wasur.

Dimulai pada tahun 2022, FORCLIME hadir di Wasur. Program kerja sama teknis Pemerintah Federal Jerman dan Pemerintah Indonesia, mendukung Balai Taman Nasional Wasur, berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk berkembang secara harmonis dengan hutan melalui pendampingan masyarakat adat mulai dari kelembagaan dan pengelolaan kawasan hingga mendukung usaha kecil.

Dari pengalaman pendampingan ini, terungkap tiga belas unit usaha masyarakat lokal yang telah berkembang di Wasur, masing-masing memanfaatkan potensi unik daerah tersebut. Salah satu contoh inspiratif adalah kelompok Bualas, yang dinamai sesuai nama rumah marga Kaize di dekat Kampung Wasur. Para wirausahawan dari kalangan kelompok tani ini sangat peduli terhadap anggrek, dan pada tahun 2022, mereka secara resmi membentuk Koperasi Komunitas Anggrek Wasur Bualas. Misi mereka? Untuk membudidayakan dan berbagi keindahan anggrek dengan dunia!



Wasur bukan sekadar kampung; ia adalah gerbang menuju petualangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Wasur pada tahun 1997, sebuah keajaiban alam yang luasnya mencapai lebih dari 400.000 hektare.



Papan informasi mengenai anggrek lokal yang dibudidayakan oleh Komunitas Anggrek Wasur Bualas

Koperasi Bualas: Merintis Legalitas Usaha Anggrek

Koperasi Bualas, sebuah inisiatif inspiratif dari masyarakat adat di sekitar Taman Nasional Wasur, telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mengelola kawasan mereka. Dibina oleh Balai Taman Nasional Wasur dan didukung penuh oleh FORCLIME, mereka telah menorehkan kemajuan pesat. Semangat mereka berkobar, sistem administrasi organisasi KTH mereka semakin rapi, dan mereka semakin terampil dalam mengelola dan memasarkan tanaman anggrek dari hutan sekitar sebagai sumber pendapatan utama. Sebuah prestasi yang patut diacungi jempol!

Bayangkan, berdasarkan identifikasi, kelompok Bualas mengelola kurang lebih 22 jenis anggrek endemik! Anggrek, sebagai salah satu aset berharga hasil hutan bukan kayu, memiliki potensi ekonomi yang besar. Untuk memaksimalkan potensi ini dan memastikan keberlanjutan usaha, izin usaha yang legal menjadi sangat krusial. Izin ini akan membuka jalan bagi mereka untuk memasarkan anggrek ke luar Kampung Wasur, bahkan hingga keluar Merauke sebagai cinderamata yang unik.

Sejak Agustus 2022, Balai Taman Nasional Wasur bersama tenaga pendamping lapangan telah bekerja keras mendampingi Kelompok Bualas dalam proses perizinan usaha. Berbagai persyaratan administrasi telah dilengkapi dengan cermat, termasuk Proposal Perizinan untuk Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan Anggrek yang telah diperiksa oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah III Merauke. Mereka juga telah mengajukan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, sebuah langkah maju yang menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalankan usaha yang legal dan berkelanjutan.

Komitmen Kelompok Bualas tidak berhenti di situ. Mereka aktif menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak berwenang, mulai dari tingkat kabupaten, Provinsi Papua dan Papua Selatan, hingga UPT KLHK di daerah. Diskusi produktif telah terjalin dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke, Dinas Penanaman Modal Terpadu Perizinan Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan, hingga Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Papua.

Perjalanan menuju legalitas usaha memang membutuhkan proses dan kesabaran. Namun, dengan semangat pantang menyerah dan kerja keras yang diperlihatkan, Koperasi Bualas semakin dekat dengan mimpi mereka untuk mengembangkan usaha anggrek yang legal, berkelanjutan, dan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Bayangkan, berdasarkan identifikasi, kelompok Bualas mengelola kurang lebih 22 jenis anggrek endemik! Anggrek, sebagai salah satu aset berharga hasil hutan bukan kayu, memiliki potensi ekonomi yang besar.

Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat di Kampung Wasur

Fasilitator kampung telah mendampingi Kelompok Usaha Bualas di Kampung Wasur untuk mendapatkan izin usaha. Ternyata, prosesnya cukup menantang bagi masyarakat lokal. Pertama, banyak yang belum familiar dengan pentingnya kartu identitas kependudukan. Padahal, identitas ini krusial untuk membentuk badan hukum, yang jadi syarat mendapatkan izin usaha legal. Kedua, pemahaman tentang izin pemanfaatan sumber daya alam juga perlu ditingkatkan. Banyak yang menganggap sumber daya alam, seperti anggrek, bisa dimanfaatkan bebas. Padahal, ada izin penangkaran dan peredaran yang harus dimiliki. Tanpa izin, ada konsekuensi hukum yang bisa merugikan. Ketiga, proses mendapatkan izin penangkaran dan peredaran anggrek juga cukup rumit. Anggrek, sebagai tanaman endemik bernilai ekonomi dan konservasi tinggi, perlu dilindungi. Untuk memanfaatkannya, dibutuhkan izin yang diproses melalui sistem daring. Masyarakat harus registrasi, membuat akun, mengisi formulir usaha, hingga melengkapi dokumen administrasi.

Koperasi Bualas sendiri telah melakukan upaya penangkaran dan budidaya anggrek di lahan seluas 3,4 Ha di wilayah ulayat mereka. Usaha mereka berskala lokal dan tidak berdampak negatif bagi lingkungan. Meskipun Nomor Induk Berusaha sudah terbit, proses verifikasi dokumen untuk mendapatkan izin legal melalui sistem OSS RBA masih berlangsung.

Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pendamping, masyarakat, dan pemerintah, sangat dibutuhkan agar proses perizinan usaha bagi masyarakat lokal bisa lebih mudah dan lancar.



Anggrek kribo (*Dendrobium spectabile*), salah satu jenis anggrek budidaya KTH Bualas.

Pertemuan Forum Satu Data untuk Berbagi Data dan Kolaborasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menindaklanjuti [lokakarya untuk meningkatkan kualitas statistik lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan kebijakan publik](#), Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan pertemuan untuk berbagi data dan kolaborasi di lingkungan Kementerian. Pertemuan Forum Satu Data ini dilaksanakan pada 20 Agustus 2024 di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Acara yang dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi, Firman Maulana, S.Pi., M. SEP., bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan sinkronisasi data di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mendukung terwujudnya [Satu Data Indonesia](#) (SDI) yang lebih baik.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas kemajuan penilaian Kerangka Kerja Pengembangan Statistik Lingkungan Hidup (FDES) dan penyelesaian draf Buku Statistik Kementerian tahun 2023.



Secara keseluruhan, pertemuan tersebut menyoroti pentingnya data dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Praktik pengelolaan data yang lebih baik dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih tepat, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan pada akhirnya, upaya konservasi lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih efektif. Peserta sepakat tentang perlunya kolaborasi dan peningkatan berkelanjutan dalam praktik pengelolaan data untuk mencapai tujuan inisiatif Satu Data Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Fadhilatunnisa Nurhadiza**, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
2. **Mohammad Rayan**, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
3. **Wandojo Siswanto**, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berada di bawah koordinasinya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat nilai paling unggul dengan jumlah indikator hijau terbanyak, yakni mencapai 20 bidang. Namun, KLHK juga menghadapi tantangan, yakni sembilan indikator berstatus merah, yang mengindikasikan bahwa diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Meskipun demikian, pada bulan Agustus 2024, KLHK telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upayanya mencapai SDGs.

Dalam rangka evaluasi dan konsolidasi data capaian SDGs, KLHK menyelenggarakan pertemuan yang dimotori oleh Biro Perencanaan, didukung FORCLIME, pada tanggal 22 Agustus 2024 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan, Dr. Edi Sulisty Heri Susetyo, dan dihadiri oleh perwakilan dari Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Badan Standarisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan moderator dari Tenaga Ahli Menteri Bidang SDGs dan Kebijakan Energi.



Tujuan pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Menyinkronkan dan mengumpulkan data terkini tentang indikator SDG untuk tahun 2023.
- Mengidentifikasi dan menyusun strategi tindak lanjut untuk indikator yang kinerjanya kurang baik.
- Meningkatkan kolaborasi antar divisi untuk meningkatkan kinerja SDG secara keseluruhan.

Pertemuan ini penting untuk memenuhi komitmen internasional Indonesia dan memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, KLHK berupaya untuk memperkuat perannya sebagai pemimpin dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengatasi kesenjangan yang dapat menghambat kemajuan menuju Agenda 2030.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Fadhilatunnisa Nurhadiza**, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
2. **Mohammad Rayan**, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
3. **Wandojo Siswanto**, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Lokakarya Penyempurnaan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dalam rangka penyempurnaan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama Kebijakan, Dr. Bambang Supriyanto, menyelenggarakan lokakarya untuk mengidentifikasi isi Peraturan Menteri yang perlu direvisi mengingat dinamika pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak dan perkembangan kebijakan. Lokakarya yang didukung oleh FORCLIME ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Ditjen Perencanaan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKTL) dan Biro Hukum Kementerian, serta LSM yang bergerak di bidang Perhutanan Sosial.

Revisi Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih tangguh, adaptif, dan efektif untuk pengelolaan perhutanan sosial yang sejalan dengan arahan legislatif saat ini, seperti Peraturan

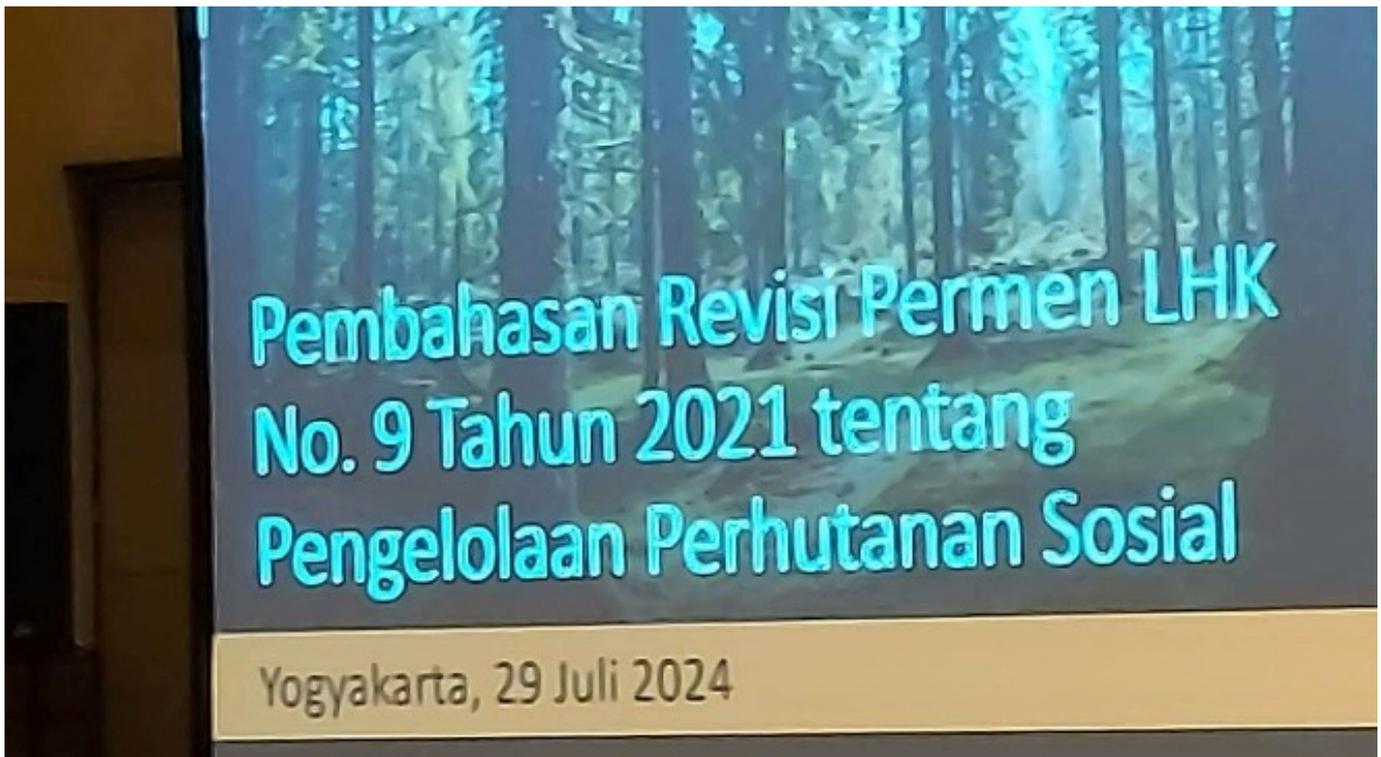
Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu untuk Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan memenuhi kebutuhan dinamis masyarakat setempat.

Beberapa penyesuaian dan revisi terhadap Keputusan tersebut, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial;
2. Mekanisme perubahan dan berakhirnya persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial;
3. Pemanfaatan hutan dan mekanisme kerja sama usaha pemanfaatan hutan;
4. Kriteria penetapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Platina atau Platinum;
5. Evaluasi persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan Pengelolaan Khusus;
6. Format dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang saat ini belum mengakomodasi kearifan lokal dalam Hutan Adat dan belum memperhatikan isu adaptasi mitigasi perubahan iklim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Fadhilatunnisa Nurhadiza**, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
2. **Mohammad Rayan**, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
3. **Wandojo Siswanto**, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim



FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



Diimplementasikan oleh:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Bekerja sama dengan:

